



**ADANYA PERSENGKOKOLAN DALAM PELELANGAN  
PEMBANGUNAN PASAR SEMI MODERN DI SUKABUMI  
JAWA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK  
MONOPOLI SERTA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
(Study Kasus : Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2012)**

**TESIS**

**TAMAMI  
1510922011**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
2017**



**ADANYA PERSENGKOKOLAN DALAM PELELANGAN  
PEMBANGUNAN PASAR SEMI MODERN DI SUKABUMI  
JAWA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK  
MONOPOLI SERTA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
(Study Kasus : Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2012)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk memperoleh  
Gelar Magister Hukum**

**TAMAMI**

**1510922011**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
2017**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum dipublikasikan, semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : TAMAMI

NRP : 1510922011

Tanggal : 26 Juli 2017

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jakarta, 26 Juli 2017

Yang Menyatakan

The image shows a green 6000 Rupiah Indonesian Revenue Stamp (Meterai Tempel) with a handwritten signature in black ink over it. The stamp includes the text 'METERAI TEMPEL', 'TGL. 20', 'AA256AEF149828918', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The signature is written in a cursive style over the stamp.

Tamami

## PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : TAMAMI  
NPM : 1510922011  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak Penerapan Hukuman Kastrasi di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum, pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., A.PU.  
Ketua Penguji

Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.  
Penguji I/Pembimbing

Dr. Arrisman, S.H., M.H.  
Penguji II/Pembimbing



Dwi Desi Yaya Tarina, S.H, M.H.  
Dekan

Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.  
Ka. Prodi

Ditetapkan : Jakarta  
Tanggal : 25 Juli 2017

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

---

Sebagai civitas akademik UPN “VETERAN” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAMAMI  
NRP : 1510922011  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPN “VETERAN” Jakarta Hak Bebas Royalti Non- eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PENERAPAN HUKUMAN KASTRASI DI INDONESIA (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).**

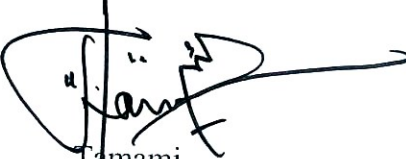
Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Non- eksklusif ini UPN “VETERAN” Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Juli 2017

Yang menyatakan

  
Tamami

**ADANYA PERSENGKOKOLAN DALAM PELELANGAN  
PEMBANGUNAN PASAR SEMI MODERN DI SUKABUMI JAWA  
BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI SERTA  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.”  
(Study Kasus : Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2012)**

**Tamami**

**Abstrak**

KPPU adalah lembaga yang paling bertanggung jawab dan memikul amanah dari pelaksanaan UULPM. KPPU pada hakekatnya mengemban misi untuk memastikan berfungsinya motor penggerak ekonomi pasar, yaitu terciptanya persaingan usaha yang efektif yang sesuai dengan fungsi dibentuknya UULPM. KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana, karena sanksi pidana tetap merupakan kewenangan pengadilan. KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif saja, akan tetapi apabila sanksi administratif tersebut tidak bisa di eksekusi kepada pelaku usaha yang dijatuhkan putusan KPPU.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui terjadinya Persengkokolan Dalam Pelelangan Pembangunan Pasar Semi Modern Di Sukabumi Jawa Barat dan mengetahui pelanggaran yang berkaitan dengan Persengkokolan Dalam Pelelangan Pembangunan Pasar Semi Modern Di Sukabumi Jawa Barat yang tertera pada isi Putusan No. 07/KPPU-L/2012 yang dapat ditindak oleh KPPU dan bagaimana upaya hukum selanjutnya. Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Hasil penelitian Putusan KPPU Nomor 19 / KPPU-L/ 2005 tidak sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerja Sama Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer-BOT) di Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 tidak termasuk dan tidak terbukti merupakan persekongkolan menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian dasar pertimbangan putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2005 mengenai persekongkolan tidak sesuai dengan maksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dasar pertimbangan KPPU dalam merumuskan ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah ”jauh lebih luas” dari pada arti dan maksud Pasal 22 tersebut, karena dalam Pasal 22 dan Pasal 1 angka 8 ini tidak termuat atau tidak mengandung unsur-unsur kerjasama, maksud, dan menguasai pasar bersangkutan.

**Kata Kunci:** Persengkokolan dan Pelelangan

**CONSPIRACY EXISTENCE IN MODERN SEMI AUCTION MARKET  
DEVELOPMENT IN WEST JAVA SUKABUMI VIEWED FROM LAW  
NUMBER 5 YEAR 1999 ON THE PROHIBITION OF MONOPOLY  
PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION. "**  
**(CASE STUDY: CASE VERDICT NO. 07 / KPPU-L / 2012)**

**Tamami**

**Abstract**

*KPPU is the most responsible institution and bear the mandate of UULPM implementation. KPPU is essentially on a mission to ensure the functioning of the market economy driving motor, namely the creation of effective business competition in accordance with the function of UULPM establishment. KPPU does not have the authority to impose criminal sanctions, because criminal sanctions remain the jurisdiction of the court. KPPU only has the authority to impose administrative sanction only, but if the administrative sanction can not be executed to the business actors who passed the decision of KPPU.*

*The purpose of this study was to determine the occurrence of conspiracy In Spring Modern Auction Market Development In Sukabumi, West Java and knowing violations related to conspiracy In Spring Modern Auction Market Development In Sukabumi, West Java listed on the contents of Decision No. 07 / KPPU-L / 2012 which can be dealt with by KPPU and how the next legal effort. This study will examine the subject through a juridical-normative approach. This normative legal research, which is studied is library material or secondary data covering primary law material, secondary law material, and tertiary legal material.*

*The results of the study the Commission's Decision No. 19 / KPPU-L / 2005 is not consistent with the intent of the provisions of Article 22 of Law No. 5 of 1999 for Public Auction Legal Partner Development Cooperation Traditional Market Semi Modern Pattern Build To Deliver (Build Operate Transfer-BOT ) in Sukabumi in 2011 are not included and are not proven to be a conspiracy, according to Article 22 of Law No. 5 of 1999. Then, the basic consideration KPPU decision No. 19 / KPPU-L / 2005 concerning the conspiracy was not in accordance with the purpose of Article 22 of Law Number 5 Year 1999. The basic consideration of KPPU in formulating the provision of Article 22 of Law Number 5 Year 1999 is "much wider" than the meaning and intent of Article 22, because in Article 22 and Article 1 point 8 this does not contain or contains elements of cooperation , Intent, and dominate the relevant market.*

**Keywords:** *Complaints and Auctions*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang maha Kuasa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, kerana keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul **ADANYA PERSENGKOKOLAN DALAM PELELANGAN PEMBANGUNAN PASAR SEMI MODERN DI SUKABUMI JAWA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI SERTA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.**” (Study Kasus : Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2012). Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Edi Sumarno Siradj, M.Sc.,Eng. sebagai Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Iwan Kresna Setiadi, S.E., M.M. sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N. sebagai Ketua Prodi Pada Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sekaligus dosen pembimbing I
4. Bapak Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing I Pada Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak Dr. Arrisman, S.H., MH. sebagai Pembimbing II Pada Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Para Guru Besar dan Staff Dosen Pengajar yang telah memberikan motivasi dan tambahan semangat serta tambahan ilmu kepada penulis.



7. Terutama Penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga Isteriku tercinta dan Anak-anakku tersayang yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan doa serta perhatian.
8. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 2017

Penulis

Tamami

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang Masalah .....	1
I.2 Perumusan Masalah .....	10
I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
I.4 Kerangka Teoritis .....	10
I.5 Kerangka Konseptual .....	18
I.6 Metode Penelitian .....	21
I.7 Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
II.1 Hukum Persaingan Usaha .....	23
II.2 Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha.....	25
II.3 Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	34
II.4 Tata Cara Penanganan Perkara Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	39
II.5 Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	43
II.6 <i>Policy Advisory</i> .....	44
II.7 Tinjauan Umum Tentang <i>Build, Operate, And Transfer</i> .....	45
<b>BAB III TINJAUAN TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER</b>	
III.1 Pengertian Persekongkolan.....	54
III.2 Pengertian Tender .....	56
III.3 Unsur-Unsur Persekongkolan Tender.....	57
III.4 Jenis-Jenis Persekongkolan Tender .....	58
III.5 Mekanisme Persekongkolan Penawaran Tender .....	60
III.6 Indikasi Persekongkolan Dalam Tender .....	63
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
IV.1 Kasus Posisi .....	70
IV.2 Pembahasan .....	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	
V.1 Kesimpulan .....	93
V.2 Saran .....	94

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	